BAB III

DALIL HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015

A. Kewenangan Peradilan Agama Nganjuk.

Berbicara tentang perkara di Pengadilan Agama Nganjuk, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan di antaranya mengenai kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Nganjuk.

1. Kewenangan relatif

Kewenangan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan wilayah hukum suatu Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 sehingga Pasal 4 ayat (1) berisi: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.[1]

Berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Nganjuk hanya berwenang menyelesaikan perkara yang berada di Kabupaten Nganjuk yang meliputi: Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Gondang, Kecamatan

[1] Pasal 4Ayat (1), Undang – undang No.7 Tahun 1989 diubah dengan Undang – undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rejoso, Kecamatan Tanjung Anom, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Baron, Kecamatan Ratianrowo, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Ngluyu.

2. Kewenangan absolut

Kewengan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan materi hukum.[2] Materi hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang - orang Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah.

Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum dimasyarakat, khususnya masyarakat muslim yang semakin meluas, maka adanya penambahan kewenangan Pengadilan Agama setelah adanya amandemen UU No. 3 tahun 2006 perubahan atas UU No. 49 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah.[3]

---

[2] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

[3] Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lihat Juga Penjelas Pasal 49 No.3 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015

Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 terdapat 5 majelis hakim, kemudian majelis hakim memeriksa permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan undang – undang yang belaku yang berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[4]

Berdasarkan surat Permohonannya Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, akan tetapi Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nganjuk menolak dengan alasan anak Pemohon usianya masih dibawah ketentuan batas usia pernikahan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk.[5] Selanjutnya permohonan dispensasi nikah didaftarkan dalam register kepaniteraan permohonan Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkan ketentuan Pasal 390 HIR perkara permohonan tersebut harus diproses dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan didaftarkan, kemudian

[4] Pasal 7 Ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[5] Ibid., Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Nganjuk memanggil Pemohan dan mendengarkan permohonannya. [6]

Pada sidang pertama pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah, majelis hakim berusaha untuk menasehati kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah batas usia pernikahan akan tetapi majelis hakim tidak berhasil.[7] Maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk yang intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Berdasarkan surat permohonan yang telah dibacakan didepan persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, maka selanjutnya majelis hakim memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngajuk persyaratan tersebut di antaranya :

1. Foto kopi kartu identitas atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nganjuk.
2. Foto kopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang dikelurakan oleh Kantor urusan agama kecamatan.
3. Foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk.

[6] Pasal 390 HIR.
[7] Perma No. 1 Tahun 2008, Upaya Mediasi, (Pasal 130 HIR/ 154 RBg).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Foto kopi akta anak Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk.
5. Foto kopi kartu keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nganjuk.
6. Foto kopi surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyratan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Foto kopi surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan persyaratan yang telah diajukan oleh Pemohon selanjutnya majelis hakim mendengarkan keterangan dari anak Pemohon beserta calon suami atau calon istri anak Pemohon, kemudian apabila calon istri sudah dalam keadaan hamil keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan saat ini calon istri dalam keadaan hamil, keduanya memberikan keterangan bahwa keduanya siap untuk membina rumah tangga serta tidak mau pernikahan mereka ditunda - tunda karena tidak ingin terjerumus dalam dosa dan untuk melindungi anak yang masih di dalam kandungan calon istri.

Kemudian majelis hakim mendengarkan keterangan yang diberikan oleh calon besan Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya keterangan tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon, kemudian Pemohon juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon beserta calon suami atau calon istri anak Pemohon, keterangan calon besan Pemohon dan kemudian didukung dengan adanya alat bukti berupa foto kopi identitas Pemohon, kutipan akta nikah Pemohon, kartu keluarga Pemohon, akta kelahiran anak Pemohon, surat keluarga calon besan, surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pernikahan, surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nganjuk, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta keterangan dua orang saksi yang telah di hadirkan oleh Pemohon. Serta berpedoman pada kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah."

Majelis hakim beralasan untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon dengan sebagaimana untuk pemenuhan kekurangan persyaratan adminitrasi dalam Pencacatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk, dari 44 permohonan dispensasi nikah tidak semua dikabulkan ada 1 permohonan dispensasi nikah digugurkan dikarenakan Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan dalam menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan yang digugurkan majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 124 HIR.[8] Kemudian 1 permohonan dispensasi nikah dicabut oleh Pemohon dalam menyelesaikan permohonan yang dicabut majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv.[9]

Selanjutnya mengenai biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dikarenakan perkara dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan dan termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Nganjuk.[10]

Berdasarkan proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 yang telah dijelaskan maka dapat diketahui jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 jumlah permohonan dispensasi nikah tersebut dapat diketahui berdasarkan Nomor register perkara penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 sebagai berikut :

No	No. Perkara	Keterangan
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	Dikabulkan
2	0003/ Pdt.P/2015/PA.Ngj	Dikabulkan
3	0004/ Pdt.P/2015/PA.Ngj	Dikabulkan
4	0012/ Pdt.P/2015/PA.Ngj	Dikabulkan

[8] Salinan Penetapan No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Ngj, 3.
[9] Ibid,…,No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Ngj, 3.
[10] Pasal 89 ayat (1) Undang –Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	0013/ Pdt.P/ 2015/PA.Ngj	Dikabulkan
6	0018/ Pdt. P/2015/PA.Ngj	Dikabulkan
7	0023/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
8	0024/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
9	0026/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Digugurkan
10	0033/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
11	0035/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
12	0036/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
13	0037/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
14	0038/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
15	0040/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
16	0042/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
17	0044/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
18	0046/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
19	0047/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
20	0050 /Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
21	0051/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
22	0052/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
23	0053/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
24	0055/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
25	0057/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
26	0060/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dicabut
27	0062/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
28	0063/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
29	0065/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
30	0067 /Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
31	0069/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
32	0072/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
33	0074/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
34	0075/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
35	0083 /Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
36	0092/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
37	0106/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
38	0107/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
39	0108 /Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
40	0110/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
41	0111 /Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
42	0113/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan
43	0127/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

44	0129/ Pdt.P/2015/PA. Ngj	Dikabulkan

Berdasarkan keterangan mengenai jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 terdapat 44 permohonan dispensasi nikah, dari 44 permohonan dispensasi nikah terdapat 7 Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 dari 7 Hakim tersebut maka terbentuk 5 majelis Hakim yang menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 berdasarkan majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut diantaranya sebagai berikut:

No	Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015
1	Drs. H. Isnandar, MH.
2	Dra. Hj. Aisyah, SH, MH.
3	Drs. H. Muhammad Mahfudz.
4	Drs . Sunaryo, M.Si.
5	Drs. Saefudin, MH.
6	Drs. A. Bashori., MA.
7	Haitami. SH, MH.

Majelis hakim satu terdapat tiga hakim yang terdiri dari Drs .Sunaryo. M.Si sebagai Ketua Majelis, Haitami, SH, MH., dan Drs. A. Bashori, MA., masing – masing sebagai hakim anggota, dalam menyelesaikan perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan dispensasi nikah, majelis hakim satu berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan relatif, Pasal 4 UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewenangan absolut Pengadialan Agama Nganjuk, Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ketentuan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 bila Pemohon menguasakan permohonannya kepada penasehat hukum, ketentuan Pasal 271 Rv, terhadap permohonan yang dicabut oleh pemohon dan berpedoman pada kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah."

No	Majelis Hakim I	No. Perkara yang sudah ditetapkan
1	Ketua Majelis Drs. Sunaryo, M.Si.	1. 0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj 2. 0003/ Pdt.P/2015/PA.Ngj 3. 0012/ Pdt.P/2015/PA.Ngj 4. 0052/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 5. 0060/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 6. 0063/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 7. 0065/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 8. 0074/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 9. 0106/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 10. 0111 /Pdt.P/2015/PA. Ngj
2	Hakim Agota Haitami, SH, MH.	
3	Hakim Anggota Drs. A. Bashori, MA.	

Majelis hakim dua terdapat tiga hakim yang terdiri dari Drs. H.M. Mahfudz., sebagai ketua majelis, Drs. Sunaryo, M.Si., dan Drs. A. Bashori, MA., masing - masing sebagai hakim anggota, dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah, majelis hakim dua berpedoman sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang berlaku antara lain, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan relatif, Pasal 4 UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewenangan absolut Pengadialan Agama Nganjuk, Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ketentuan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 bila Pemohon menguasakan permohonannya kepada penasehat hukum, dan berpedoman pada kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah."

No	Majelis Hakim II	No. Perkara yang sudah ditetapkan
1	Ketua Majelis Drs. H.M, Mahfudz.	1. 0004/ Pdt.P/2015/PA.Ngj 2. 0033/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 3. 0036/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 4. 0038/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 5. 0047/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 6. 0050 /Pdt.P/2015/PA. Ngj 7. 0067 /Pdt.P/2015/PA. Ngj 8. 0083 /Pdt.P/2015/PA. Ngj 9. 0107/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 10. 0110/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 11. 0129/ Pdt.P/2015/PA. Ngj
2	Hakim Agota Drs. Sunaryo, M.Si.	
3	Hakim Anggota Drs. A. Bashori, MA.	

Majelis hakim tiga terdapat tiga hakim yang terdiri dari Drs. Saefuddin., MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Isnandar, MH., dan Drs. H.M. Mahfudz., masing – masing sebagai hakim anggota, dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah, majelis hakim tiga berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan relatif, Pasal 4 UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewenangan absolut Pengadialan Agama Nganjuk, Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ketentuan Pasal 124 HIR terhadap permohonan yang gugurkan karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terhadap wanita hamil diluar pernikahan dan berpedoman pada kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah."

No	Majelis Hakim III	No. Perkara yang sudah ditetapkan
1	Ketua Majelis Drs. Saefuddin, MH.	1. 0013/ Pdt.P/ 2015/PA.Ngj 2. 0024/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 3. 0026/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 4. 0037/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 5. 0040/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 6. 0042/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 7. 0044/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 8. 0046/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 9. 0051/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 10. 0053/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 11. 0069/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 12. 0072/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 13. 0075/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 14. 0108 /Pdt.P/2015/PA. Ngj
2	Hakim Agota Drs. H. Isnandar, MH.	
3	Hakim Anggota Drs. H.M, Mahfudz.	

Majelis hakim empat terdapat tiga hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Aisyah. SH., MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Saefuddin, MH. Haitami, SH, MH., masing – masing sebagai hakim anggota, dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah, majelis hakim empat berpedoman sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan yang berlaku antara lain, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan relatif, Pasal 4 UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewenangan absolut Pengadialan Agama Nganjuk, Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ketentuan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 bila Pemohon menguasakan permohonannya kepada penasehat hukum, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terhadap wanita hamil diluar pernikahan, serta memberikan dalil hukum Hakim yang perpedoman pada kitab suci alqur'an Surah Annur ayat 32 terhadap anjuran nikah dan berpedoman pada kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah."

No	Majelis Hakim IV	No. Perkara yang sudah ditetapkan
1	Ketua Majelis Dra. Hj. Aisyah, SH, MH.	1. 0018/ Pdt. P/2015/PA.Ngj 2. 0023/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 3. 0035/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 4. 0057/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 5. 0127/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 6. 0055/ Pdt.P/2015/PA. Ngj
2	Hakim Agota Drs. Saefuddin, MH.	
3	Hakim Anggota Haitami. SH, MH.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim lima terdapat tiga hakim yang terdiri dari Drs. H. Isnandar, MH., sebagai ketua majelis, dan, Drs. H.M. Mahfudz., dan Haitami, SH, MH., masing – masing sebagai hakim anggota, didalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah, majelis hakim enam berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan relatif, Pasal 4 UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewenangan absolut Pengadialan Agama Nganjuk, Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dan berpedoman pada kaidah fikih yang artinya "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah."

No	Majelis Hakim V	No. Perkara yang sudah ditetapkan
1	Ketua Majelis Drs. H. Isnandar, MH.	1. 0062/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 2. 0092/ Pdt.P/2015/PA. Ngj 3. 0113/ Pdt.P/2015/PA. Ngj
2	Hakim Agota Drs. H.M. Mahfudz.	
3	Hakim Anggota Haitami., SH, MH.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015

Dalil hukum hakim merupakan dalil yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara, dalil hukum hakim ini mempengaruhi keabsahan sutau perkara dari dalil hukum ini dapat diketahui tentang sumber hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara.[11] Sebagaimana dalil hukum hakim yang digunakan dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

Dari sekian banyak dalil hukum yang sering digunakan oleh majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015, dapat diketahui sebagai berikut :

Dalil hukum hakim yang pertama menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 Pemohon hendak menikahkan anaknya, akan tetapi pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk menolak dengan alasan bahwa anak Pemohon masih dibawah batas usia pernikahan, atas penolakan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Nganjuk.[12]

---

[11] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 57.
[12] Salinan Penetapan No. 0002/Pdt.P/2015/PA.Ngj. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 44 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomer Perkara	No	Nomer Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0060/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	29	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0026/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	43	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
22	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	44	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Dalil hukum hakim mengenai keabsahan Pemohon yang bertempat tinggal di Kabuapten Nganjuk mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 majelis Hakim I, II, III, IV, maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

V berpedoman pada ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kabupaten atau Kota daerah Pemohon.[13] berdasarkan kewenangan relatif tersebut Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk patut diterima.

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 44 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomer Perkara	No	Nomor Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0060/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	29	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0026/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

[13] Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	43	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
22	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	44	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Dalil hukum hakim mengenai keabsahan tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk 2015 majelis hakim I, II, III, IV, maupun V, berpedoman pada ketentuan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim I, II, III, IV, maupun V, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan salah satunya perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk berdasarkan kewenangan absolut, maka Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk patut diterima.[14]

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 44 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

[14] Salinan Penetapan No. 0037/ Pdt.P/2015.PA.Ngj. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0060/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	29	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0026/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	43	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
22	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	44	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Dalil hukum hakim mengenai adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008, jika mediasi gagal, maka majelis hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg.[15] Berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 majelis hakim berkewajiban untuk memberikan saran dan nasehat kapada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah ketentuan batas usia

[15] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama*, (Edisi revisi, Jakarata 2010. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada permohonnya.

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 42 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	22	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil hukum hakim berkaiatan dengan perlengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk, Pemohon harus melengakapi syatat – syatat formil yang berupa dokumen antara lain: foto kopi identitas Pemohon, kutipan akta nikah Pemohon, kartu keluarga Pemohon, akta kelahiran anak Pemohon, surat keluarga calon besan Pemohon, serta surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pernikahan dan surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk, berdasarkan alat bukti ysng telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya serta telah bermaterai, majelis hakim berpendapat bahwa persyaratan yang sudah diajukan oleh Pemohon sudah lengkap, maka permohonan Pemohon berdasarkan persyaratan formil patut diterima.

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 42 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	22	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Dalil hukum hakim berdasarkan keterangan yang disampaikan dari beberapa pihak didepan persidangan diantaranya, anak Pemohon beserta calon suami atau calon istri anak Pemohon, calon besan Pemohon, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, dalil hukum hakim ini diberikan agar dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk didukung fakta dan keterangan dari beberapa pihak yang terkait apabila sudah sesuai, maka berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak yang terkait maka permohonan Pemohon patut untuk diterima.

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 42 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomer Perkara	No	Nomer Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	22	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Dalil hukum hakim berkaitan dengan keabsahan saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agamnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengarkan kesaksiannya, mengenai kedua saksi tersebut yang telah dihadirkan oleh para Pemohon memberikan keterangan bahwa kedua saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui tentang duduk perkara bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon akan tetapi ditolak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 144 – 148 HIR dalam memberikan keterangannya dalam kesaksiannya didepan persidangan.[16]

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 42 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	22	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

[16] Penetapan No. 0037/Pdt.P/2015/PA.Ngj, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Dalil hukum hakim mengenai keterangan yang telah didengarkan di depan persidangan keterangan dari kedua orang saksi, antara anak Pemohon dengan calon suami atau calon istri, maupun keterangan yang diberikan oleh calon besan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa antara anak pemohon dengan calon suami atau calon istri, keduanya sedemikian akrabnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga di kwatirkan akan terjerumus kedalam hal – hal yang dilarang Agama jika tidak segera dinikahkan, maka majelis hakim I, II, II, IV, maupun V berpendapat lebih mengutamakan akibat hukum selanjutnya bila mana permohonan tidak dikabulkan, maka akan terjadi akibat- akibat yang sangat merugikan bisa saja keduanya berbuat zina jika tidak segera dikawinkan dengan bersandar pada kaidah fikih yang berbunyi: maslahah mursalah yaitu "menolak serta upaya mencegah kemudhorotan."[17] Maka majelis hakim berpendapat demi mencegah akibat hukum yang tidak diingikan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 42 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui

[17] Salinan Penetapan, 0047/Pdt.P/2015/PA.Ngj. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	22	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Dalil hukum hakim bilamana terdapat calon isteri sudah dalam keadaan hamil, majelis hakim III dan majelis hakim IV, berpendapat memberikan penambahkan dalil hukum hakim, guna mempertimbangkan kepastian dan perlindungan anak yang ada dalam kandungan calon istri, penambahan penggunaan dalil hukum tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat norma hukum bahwa “seorang wanita hamil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" selanjutnya dalam pasal 53 Ayat (2) dinyatakan bahwa "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa lebih menunggu kelahiran anaknya."[18] Dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mjelis Hakim III dan IV berpendapat permohonan patut dikabulkan, demi kepastian hukum anak yang ada dalam kadungan calon istri.

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 9 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	6	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	7	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	8	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	9	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj		

Dalil hukum hakim apabila dalam permohonan dispensasi nikah Pemohon menguasakan permohonan kepada penasehat hukum, majelis hakim I, II, IV dan V, mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan surat kuasa yang dikuasakan oleh Pemohon kepada penasehat hukum, kemudian majelis hakim berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman

[18]Salinan Penetapan, 0057/Pdt.P/2015/PA.Ngj. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanan tugas dan fungsi adminitrasi peradilan Agama buku II edisi revisi yang menyatakan bahwa kuasa hukum yang bertidak sebagai kuasa/wali dari pemohon/termohon atau termohon atau termohon di Pengadilan salah satu diantaranya adalah penasehat hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[19] Dengan ketentuan tersebut apabila penasehat hukum yang diberi kuasa oleh Pemohon untuk melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk, sudah sesuai dengan ketentuan sebagai profesi penasehat hukum, dan masih aktif maka majelis hakim berpendapat, permohon yang dilakukan oleh penasehat hukum tersebut patut dikabulkan.

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 4 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara
1	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0060/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

[19] Salinan Penetapan, 0055/ Pdt.P/2015/PA.Ngj, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian banyak dalil hukum hakim yang digunakan untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 majelis hakim IV juga dilengakapi dengan dalil hukum Hakim salah satunya menggukan dalil hukum hakim yang mengambil dari kitab suci alquran dalam surah Annur Ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[20]

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 5 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara
1	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	00127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

[20] Departemen Agama RI, *Al –Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil hukum hakim mengenai permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 terdapat satu permohonan dispensasi nikah digugurkan dikarenakan pemohon tidak hadir dalam persidangan yang sudah ditentukan, majelis hakim dalam menyelesaiakan permohonan digugurkan berpedoman pada ketentuan Pasal 124 HIR, menyatakan permohonan pemohon digugurkan dalam tahun 2015 hanya terdapat 1 permohonan dispensasi nikah digugurkan terdapat dalam nomor register penetapan 0026/Pdt.P/2015/PA.Ngj. Dalil hukum mengenai permohonan yang dicabut oleh Pemohoan majelis hakim dalam menyelesaikan permohonan yang dicabut oleh Pemohon berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 terdapat 1 permohonan di cabut terdapat dalam nomor regirter penetapan 0060/Pdt.P/2015/PA.Ngj.

Dalil hukum hakim mengenai biaya perkara dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 majelis hakim I, II, III, IV, maupun V, berpedoman berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.[21]

[21] Salinan Penetapan, 0057/Pdt.P/ 2015/ PA.Ngj. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil hukum hakim ini digunakan dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebanyak 44 dalil hukum hakim, dalil hukum hakim tersebut dapat diketahui melalui nomor register penetapan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1	0002/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	23	0053/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
2	0003/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	24	0055/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
3	0004/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	25	0057/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
4	0012/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	26	0060/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
5	0013/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	27	0062/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
6	0018/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	28	0063/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
7	0023/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	29	0065/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
8	0024/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	30	0067/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
9	0026/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	31	0069/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
10	0033/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	32	0072/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
11	0035/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	33	0074/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
12	0036/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	34	0075/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
13	0037/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	35	0083/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
14	0038/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	36	0092/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
15	0040/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	37	0106/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
16	0042/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	38	0107/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
17	0044/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	39	0108/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
18	0046/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	40	0110/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
19	0047/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	41	0111/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
20	0050/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	42	0113/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
21	0051/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	43	0127/Pdt.P/2015/ PA.Ngj
22	0052/Pdt.P/2015/ PA.Ngj	44	0129/Pdt.P/2015/ PA.Ngj

Berdasarkan pertimbangan yang telah diberikan oleh majelis hakim diatas demi menghindari kerusakan atau mafsadah harus didahulukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan kebaikan atau maslahah maka, kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi nikah sehingga pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di Instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis Hakim atas permohonan pemohon patut untuk dikabulkan, selanjutnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk, agar dapat melaksanakan pernikahan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id